

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi perekonomian Indonesia pada umumnya menyebabkan peningkatan pesat tuntutan masyarakat atas mutu dan jenis jasa profesi akuntan publik sehingga dengan sendirinya profesi akuntan publik menghadapi berbagai tantangan.

Informasi akuntansi dari suatu perusahaan sangat dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak internal mempunyai akses langsung dalam memperoleh informasi akuntansi sedangkan bagi pihak eksternal terutama dalam hal perusahaan publik, informasi akuntansi agar dapat dipertanggung jawabkan kelayakannya terlebih dahulu harus melalui audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan auditing sesuai dengan standar profesional serta telah menjunjung tinggi kode etik profesi akuntansi yang berlaku. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa peran profesi akuntansi sangat penting sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran informasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan adanya fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh M. Soetojo bahwa dewasa ini kebutuhan akan akuntan menjadi unsur penunjuang penting dalam mendukung kinerja perusahaan. Mengingat aktivitasnya yang dibutuhkan kalangan dunia usaha, menjadikan akuntan harus benar-benar menjalankan profesinya sesuai dengan etika. Sebab melalui ungkapan dan opininya akuntan ikut menentukan dalam pemberian nilai terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu, Soetojo sangat mengkhawatirkan adanya akuntan-akuntan yang tidak bertanggung jawab, seperti akuntan yang sembarangan saja memberikan opini wajar tanpa pengecualian. “Ini jelas menyesatkan dan tidak baik”.(Media Akuntansi; 1997; 21)

Peran profesi akuntansi yang strategis menuntut para akuntan untuk bekerja dengan lebih baik, tertib, tidak menyalahi aturan yang berlaku, serta

mampu menghasilkan prediksi strategis secara cepat, maupun memberikan saran membangun dan pemecahan berbagai masalah keuangan yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan, dalam menyelenggarakan keuangan bagi pihak-pihak lain secara baik, tepat, dan benar.

Sejalan dengan besarnya peranan tersebut, profesi akuntan juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Tanggung jawabnya bukan sekedar tanggung jawab moral individu dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan sosial sebagai warga negara yang baik. Akuntan publik diharapkan untuk melaksanakan standar profesinya secara sungguh-sungguh termasuk menghindari *conflict of interest* dan mempertahankan sikap *independence* dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Fenomena lainnya yang sedang berkembang di masyarakat, menurut Irwanto yang dimuat dalam artikel Media Akuntansi (2003; 6) adalah orang yang layak menjalankan praktik profesional akuntan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan integritas. Dari situ tumbuh dan muncul kepercayaan baik dari klien maupun *stockholder*. Laporan yang dibuat bisa berakibat fatal terhadap perusahaan itu sendiri, karena sebagai alat bukti hukum tertulis, kalau akuntan publik mengeluarkan laporan hasil audit keuangan ternyata tidak benar, bisa berindikasi kepada akuntan yang bersangkutan. Yang akhirnya mendorong pencemaran nama baik. Akuntan publik yang mengeluarkan laporan audit keuangan maka dia harus berani bertanggung jawab terhadap laporan yang dikeluarkan. Karena setiap laporan keuangan yang kita keluarkan harus dipertanggungjawabkan sebagai produk hukum. Dengan begitu secara otomatis akan ada konsekuensinya. (Media Akuntansi; 2003; 6)

Bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit bentuk baku dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, tetapi jenis pendapat ini tidak selalu tepat dalam segala situasi karena ada kondisi-kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian dan dampak dari kondisi tersebut material, maka auditor harus memberikan pendapat selain wajar tanpa

pengecualian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut dan tertarik untuk mengambil judul:

**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTAN PUBLIK MEMBERIKAN PENDAPAT SELAIN WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

(Studi Survei pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik mengadakan penelitian untuk mengidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian.
2. Faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan publik dalam memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan disamping itu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian dan faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi akuntan publik dalam memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian, selain itu sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi, jurusan akuntansi Universitas Widyatama.

2. Akuntan publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kendala yang dihadapi dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian.

3. Masyarakat.

Khususnya di lingkungan perguruan tinggi, memberikan tambahan pengetahuan di masa yang akan datang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan publik dalam memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian serta memberikan informasi dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan laporan keuangan yang berkualitas untuk pengambilan keputusan ekonomi tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Disini terdapat dua kepentingan yang berlawanan, disatu pihak manajemen perusahaan yang ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, dipihak lain, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang handal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggung jawaban dana yang mereka investasikan. Dengan demikian perlu audit laporan keuangan oleh auditor

independen atau akuntan publik untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan.

Standar Profesi (SPAP) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit.

Menurut Mulyadi (1998; 31) tujuan audit atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan”.

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan para pemakai laporan keuangan yang didalamnya terdapat pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Perusahaan yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dan diberi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) akan semakin dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Pada kenyataannya, penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku dengan pendapat wajar tanpa pengecualian tersebut dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyimpang dari kriteria yang telah terjadi ditetapkan oleh IAI. Ada dua penyimpangan yaitu laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata, dan pernyataan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian terdiri dari tiga pendapat yaitu pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Dalam beberapa keadaan auditor mungkin perlu memberi penekanan atas suatu hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, namun ia bermaksud untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor berpedoman pada standar auditing yang terdapat di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Auditor independen melakukan audit terhadap laporan keuangan klien untuk menilai kepatuhannya pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga perusahaan klien harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar diberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Selain itu prinsip akuntansi yang berlaku umum harus secara konsisten diterapkan agar laporan keuangan bisa dibandingkan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Bila manajemen menghilangkan informasi yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka audit harus memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Auditor juga tidak boleh mengungkapkan informasi yang tidak seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum tanpa izin kliennya dalam memperhitungkan cukup atau tidaknya pengungkapan dalam segala aspek lain auditnya, auditor menggunakan akuntan yang diterima kliennya atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh kliennya bahwa akuntan publik akan merahasiakan informasi tersebut.

Akuntan publik harus independen dalam hubungannya dengan klien dalam penerimaan penugasan agar laporan auditnya dipercaya oleh masyarakat dalam arti dia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan kliennya. Ia tidak dibenarkan memihak pada siapapun, karena hal tersebut akan menyebabkan hilangnya sikap tidak memihak yang sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Pada dasarnya auditor lebih menyukai penunjukkan audit secara dini, karena hal tersebut akan memberi banyak manfaat bagi auditor maupun klien. Auditor dapat mengumpulkan bahan bukti dalam jumlah yang cukup, dengan demikian ia dapat merencanakan auditnya dan menentukan pelaksanaan audit secara tepat dan efisien sebelum tanggal neraca. Auditor juga dapat mengusulkan



modifikasi prosedur akuntansi yang perlu diperbaharui jika ditemukan persoalan-persoalan akuntansi yang berdampak terhadap laporan keuangan. Penugasan akuntan publik pada saat mendekati atau setelah tanggal neraca memungkinkan adanya pembatasan lingkup audit baik oleh klien maupun oleh pihak ketiga selain klien dan akuntan publik sendiri.

Dalam penugasannya akuntan publik sering menghadapi ketidakpastian dari suatu masalah yang hasil akhirnya tidak dapat diestimasikan secara wajar pada saat laporan keuangan diterbitkan. Jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung asersi manajemen tentang sifat masalah yang menyangkut ketidakpastian dan penyajian atau pengungkapannya dalam laporan keuangan, maka ia harus mempertimbangkan perlunya memberi pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Dalam hal ini terdapat 5 (lima) tipe pendapat auditor adalah sebagai berikut :

1) Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Contoh laporan audit standar :

Kantor Akuntan Publik Andri, Sentanu dan Rekan  
Gedung Lima Pahlawan  
Jalan Jenderal Kamioso No.12  
Jakarta Pusat

Laporan Auditor Independen

Kepada

Para pemegang saham PT Roda Lingkar

Kami telah mengaudit maraca PT Roda Lingkar tanggal 31 Desember 19X5 dan 19X4, dan laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan

adalah tanggungjawab manajemen perusahaan. Tanggungjawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian , bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Roda Lingkar pada tanggal 31 Desember 19X5 dan 19X4, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

Andri Irawan

Akuntan Register Negara No. D-1234

5 Maret 19X6

2) Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan  
(*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Bahasa



penjelasan (*explanatory language*) adalah paragraf, frasa, kalimat, atau kata yang digunakan untuk memberikan penjelasan oleh auditor.

Contoh laporan dengan paragraf penjelasan karena adanya perubahan prinsip akuntansi :

#### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Paragraf pendahuluan, lingkup audit, dan pendapat sama dengan laporan audit bentuk baku)

Seperti dibahas dalam catatan 8 dalam laporan keuangan, Perusahaan mengubah metode perhitungan penyusutan dalam tahun 19X2.

#### 3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Contoh laporan pendapat wajar dengan pengecualian atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum :

#### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Paragraf pendahuluan dan paragraph lingkup audit sama seperti laporan audit bentuk baku)

Perusahaan tidak memasukkan dalam aktiva tetap dan kewajiban pada neraca terlampir, kewajiban sewa guna usaha tertentu yang menurut pendapat kami harus dikapitalisasi agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika kewajiban sewa guna usaha ini dikapitalisasi, aktiva tetap akan bertambah sebesar Rp. 9,2 milyar; utang jangka panjang sebesar Rp. 8,4 milyar dan laba ditahan sebesar Rp. 800 juta per 31 Desember 19X5, serta laba bersih dan laba per saham akan meningkat masing-masing sebesar Rp. 800 juta dan Rp. 350 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak dari tidak dikapitalisasinya kewajiban sewa guna usaha, seperti kami uraikan dalam paragraf sebelumnya, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Ayahanda pada tanggal 31 Desember 19X5, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

Contoh laporan pendapat tidak wajar karena tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum :

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Paragraf pendahuluan dan lingkup audit sama seperti laporan audit bentuk baku)

(Paragraf ketiga sama dengan contoh laporan di atas)

Menurut pendapat kami, karena dampak yang kami uraikan dalam paragraf sebelumnya, laporan keuangan di atas tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan PT Ayahanda pada tanggal 31 Desember 19X5, serta hasil usaha dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

5) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Contoh laporan pernyataan tidak memberikan pendapat karena ketiadaan independensi :

Kami tidak independen dalam hubungannya dengan PT XYZ, dan neraca tanggal 31 Desember 19X9 terlampir, serta laporan rugi laba ditahan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak kami audit. Karena itu kami tidak menyatakan pendapat atas laporan tersebut.

Catatan : jika auditor tidak independen, tidak ada judul laporan yang diberikan.

Akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kondisi yang menyebabkan keraguan atas kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca (*going concern*). Dalam hal ini akuntan publik harus menilai apakah kondisi tersebut berdampak terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup entitas, apakah terdapat tindakan yang ditempuh dan rencana manajemen yang efektif untuk mengatasi masalah *going concern* tersebut, dan apakah terdapat pengungkapan yang memadai dari klien dalam laporan keuangan tentang masalah *going concern*, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

Jika klien Kantor Akuntan Publik memiliki perusahaan anak, divisi, cabang, komponen, atau investasi yang tersebar luas, auditor dapat menyerahkan sebagai tanggung jawab auditnya kepada akuntan publik yang lain. Dalam hal ini akuntan publik dapat membuat pertimbangan profesional apakah ia akan bertindak sebagai auditor utama dengan menggunakan atau mengacu pada pekerjaan dan laporan auditor independen lain yang telah mengaudit laporan keuangan satu atau lebih anak perusahaan, divisi, cabang, komponen, atau investasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan atau tidak mengacu kepada laporan auditor lain. Keputusan untuk mengacu atau tidak mengacu tersebut mendorong akuntan publik untuk memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian.

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, akuntan publik hanya memberikan pendapat mengenai kewajaran (*fairness*) laporan keuangan, bukan memberikan suatu pernyataan mutlak atau jaminan kebenaran (*correctness*) karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit

dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkaskan, digolongkan dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan sendiri berisi pendapat, estimasi dan pertimbangan dalam proses penyusunan yang seringkali pendapat, estimasi, dan pertimbangan tersebut tidak akurat atau tepat seratus persen.

Kenyataan bahwa auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketepatan informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan mengharuskan auditor mempertimbangkan baik materialitas maupun resiko audit. Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia harus bersedia menerima beberapa kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Konsep resiko audit menunjukkan tingkat resiko kegagalan audit untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

Dalam menyatakan pendapatnya, auditor menggunakan bukti audit, yaitu segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan. Standar pekerjaan lapangan ketiga mewajibkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Cukup atau tidaknya bukti audit menyangkut kuantitas bukti yang harus diperoleh auditor dalam auditnya. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit adalah materialitas dan resiko, faktor ekonomi, ukuran, dan karakteristik populasi. Sedangkan kompetensi bukti audit menyangkut kualitas atau keandalan bukti yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sumber bukti, pengendalian intern dan cara untuk memperoleh bukti. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara materialitas, risiko audit, pengendalian intern, dan bukti audit.

Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Tujuan auditor

mengumpulkan informasi mengenai pengendalian intern adalah untuk memungkinkan auditor merencanakan prosedur auditnya dimana auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya. Semakin lemah pengendalian intern perusahaan, semakin banyak jumlah bukti audit yang dikumpulkan jika pengendalian intern lemah, auditor harus mengumpulkan jumlah bukti audit yang lebih banyak.

Dalam melaksanakan audit, auditor independen dapat meminta bantuan langsung dari auditor intern, hal ini terdapat dalam SA seksi 322 “Pertimbangan Auditor Atas Fungsi Audit Laporan Keuangan” yang memberikan panduan bagi auditor independen dalam mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan dalam menggunakan pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien. Bantuan langsung berkenaan dengan pekerjaan yang secara spesifik, diminta oleh auditor independen dari auditor intern untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor independen. Untuk meletakkan kepercayaan terhadap hasil pekerjaan auditor intern auditor independen harus menentukan kompetensi dan objektivitas auditor intern.

Dari uraian diatas maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian adalah :

1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan.

2. Pendapat Wajar dengan Pengecualian

Kondisi-kondisi yang membuat auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian :

- a) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.

- c) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- d) Prinsip akuntansi berlaku umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

### 3. Pendapat Tidak Wajar

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya. Sehingga auditor ragu atas kelangsungan usaha klien.

### 4. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat

Auditor tidak memberikan pendapat jika menjumpai kondisi seperti pembatasan yang diluar biasa sifatnya terhadap lingkup audit, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Kondisi-kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat selain wajar tanpa pengecualian :

#### **Kondisi 1. Pembatasan lingkup audit**

Jika auditor tidak berhasil mengumpulkan bahan bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diperiksa disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berarti bahwa lingkup auditnya dibatasi. Ada dua penyebab utama pembatasan lingkup audit : pembatasan yang disebabkan oleh klien dan yang disebabkan oleh kendala di luar kekuasaan auditor maupun klien.

#### **Kondisi 2. Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.**

Sebagai contoh, jika klien memaksa mencatat nilai pengganti sebagai nilai aktiva tetap, atau menilai persediaan sebesar harga jualnya dan bukan sebesar harga historisnya, perlu dibuat suatu modifikasi dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika prinsip akuntansi yang berlaku umum disinggung



masalah ini, perlu dipertimbangkan kecukupan dari semua penjelasan termasuk catatan kakinya.

### **Kondisi 3 Auditor Tidak Independen**

Jika auditor tidak independen, sangat jelas bahwa ia tidak diperkenankan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Masalah independen auditor diatur secara jelas dalam standar umum auditing. Ketiadaan independensi mengalahkan semua pembatasan ruang lingkup. Oleh karenanya, tidak perlu dinyatakan alasan lain bagi penolakan tersebut. Di dalam laporan tidak perlu disinggung mengenai pelaksanaan prosedur audit apapun.

### **Kondisi 4. Prinsip akuntansi yang tidak diterapkan secara konsisten**

Dalam keadaan tidak biasa, penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak harus menghasilkan pendapat wajar dengan pengecualian, atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Tetapi, untuk membenarkan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyatakan dalam paragraf atau paragraf-paragraf terpisah dalam laporan audit, bahwa dalam keadaan tersebut, hasil yang menyesatkan dapat terjadi jika tetap berpegang pada prinsip akuntansi yang berlaku.

### **Kondisi 5. Ketidakpastian yang Material**

Jika terdapat ketidakpastian yang material, terlebih dahulu auditor mengevaluasi apakah sudah ada pengungkapan fakta yang relevan secara memadai di dalam laporan keuangan, termasuk catatan kaki. Jika pengungkapan catatan kaki memadai, auditor diminta untuk menambahkan paragraf penjelasan pada laporan audit

### **Kondisi 6. Keraguan Atas Kelangsungan Hidup**

Auditor harus mempertimbangkan secara cermat adanya kemungkinan bahwa klien tidak mampu meneruskan usahanya atau memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk suatu periode yang wajar. Untuk tujuan ini, periode yang wajar dianggap tidak melebihi satu tahun dari tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Jika auditor menyimpulkan adanya keraguan atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian

dengan paragraf penjelasan perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### **Kondisi 7. Auditor Setuju dengan Penyimpangan terhadap Prinsip Akuntansi yang Berlaku**

Peraturan 203 dari Kode Etik Profesi AICPA menyatakan bahwa dalam keadaan tidak biasa, penyimpangan dari standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan yang dibentuk oleh AICPA untuk menetapkan standar akuntansi tidak harus menghasilkan pendapat wajar dengan pengecualian, atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

#### **Kondisi 8. Penekanan Atas Suatu Hal**

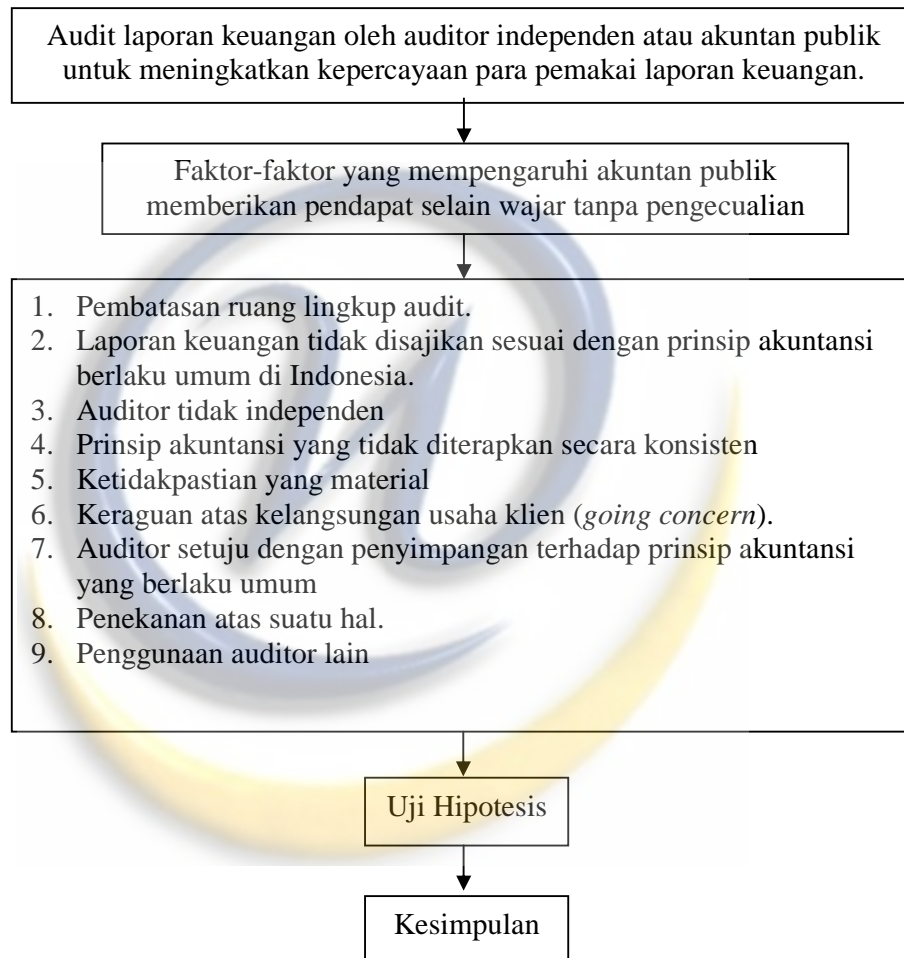
Dalam keadaan tertentu mungkin akuntan publik ingin memberikan penekanan pada hal-hal spesifik mengenai laporan keuangan yang diauditnya, meskipun dia bermaksud untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Umumnya, penjelasan tersebut dipisahkan pada paragraf terpisah dalam laporan audit.

#### **Kondisi 9. Penggunaan Auditor Lain**

Jika akuntan publik menyerahkan sebagian tanggungjawab auditnya kepada kantor akuntan publik lain, yang merupakan hal yang lazim jika kliennya memiliki beberapa perusahaan anak dan divisi yang tersebar luas.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka, disusun paradigma penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Paradigma Penelitian**



## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi empirik. Untuk memperoleh informasi dan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penulis memperoleh informasi pendukung melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan membaca literatur dan

pendapat para ahli, informasi ini digunakan sebagai pendukung dalam analisis penelitian.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer melalui pendekatan studi survei, diantaranya dengan cara mempelajari data tertulis, wawancara langsung dengan auditor independen, serta pemberian kuesioner kepada Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung.

### **1.7 Objek dan Waktu Penelitian**

Adapun sebagai objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik di Bandung. Waktu dimulai dari bulan Agustus 2009 sampai dengan Oktober 2009 yang meliputi pengumpulan dan pengolahandata sampai selesainya penelitian ini.

